

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PELATIHAN
KETERAMPILAN DI UPTD KAMPUNG ANAK NEGERI KOTA
SURABAYA**

Hadnam Al Awali

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
hadnamal@gmail.com;

Endang Indartuti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

Eddy Wahyudi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ediwahyudi@untag-sby.ac.id;

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the process of community empowerment through skill training programs implemented by the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Kampung Anak Negeri in Surabaya City. Employing a qualitative descriptive approach, data were obtained through in-depth interviews, direct observations, and documentation involving UPTD officials, training facilitators, and foster children. The findings indicate that the empowerment process consists of three stages: awareness building, capacity building, and empowerment action. The awareness stage involves developing self-awareness and understanding of social rights; the capacity-building stage includes skill training in boxing, painting, and cycling, along with formal education support; and the empowerment stage is realized through participation opportunities and recognition of the children's achievements. The program has shown positive outcomes in enhancing self-confidence, independence, and social participation. However, challenges persist, particularly the limited collaboration with external stakeholders and the need for sustained mentoring. This study recommends continuous evaluation, strengthened cross-sector partnerships, and the development of post-training programs to ensure long-term sustainability and impact.

Keywords: *Community Empowerment, Skill Training, UPTD Kampung Anak Negeri*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan di UPTD Kampung Anak Negeri (KANRI) Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pihak UPTD, pembina pelatihan, serta anak-anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran memberikan pemahaman tentang potensi diri dan hak-hak sosial; tahap pengkapasitasan meliputi pelatihan tinju, seni lukis, dan olahraga bersepeda serta pendidikan formal; dan tahap pendayaan dilakukan melalui pemberian ruang partisipasi dan pengakuan prestasi anak binaan. Program ini terbukti meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan partisipasi sosial, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kerja sama eksternal dan kebutuhan pendampingan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkelanjutan, penguatan kemitraan lintas sektor, serta penyusunan program pasca-pelatihan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Keterampilan, UPTD Kampung Anak Negeri*

A. PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan masih menjadi isu sosial yang kompleks dan menuntut perhatian serius di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya. Anak jalanan umumnya berasal dari keluarga miskin, mengalami putus sekolah, serta minim akses terhadap pendidikan dan perlindungan yang layak. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang-ruang publik dengan melakukan pekerjaan informal seperti mengamen, mengemis, atau berdagang demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, serta gangguan perkembangan fisik dan psikologis.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial berupaya memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap anak-anak dalam situasi rentan melalui program-program rehabilitasi sosial, salah satunya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri. UPTD ini berperan sebagai lembaga rehabilitasi dan pembinaan sosial yang menyasar anak-anak jalanan, anak terlantar, dan anak dari keluarga tidak mampu. Salah satu program strategis yang dijalankan adalah pelatihan keterampilan sebagai bentuk pemberdayaan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan rasa percaya diri anak-anak binaan.

Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk kelompok anak jalanan yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun proses rehabilitasi sosial terhadap kelompok ini tidaklah mudah, pemerintah tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas tersebut. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surabaya didukung oleh Dinas Sosial sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab langsung di bidang kesejahteraan sosial. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menjalankan kewenangan daerah serta

tugas-tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. UPTD ini menyediakan layanan langsung kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS dan telah melalui proses seleksi. Panti sosial berfungsi sebagai solusi terakhir bagi individu atau keluarga yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. UPTD yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Surabaya menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung visi dan misi pemerintah kota, khususnya dalam mengurangi jumlah PMKS dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. (Rahmawati & Roisul Basyar, 2023)

Tabel 1. 1 Data Anak Terlantar di Kota Surabaya

No	Tahun	Jumlah
1	2022	6.607
2	2023	3.931
3	2024	2.160

Sumber: (Dinas Sosial Kota Surabaya, 2024)

Pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pelatihan keterampilan memiliki dimensi sosial yang penting. Dalam perspektif Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, proses pemberdayaan dilakukan secara bertahap, yakni melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan, hingga pendayaan. Program ini bukan hanya ditujukan untuk mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis dan memberikan ruang partisipatif agar individu mampu mengelola kehidupannya secara mandiri. Dalam konteks anak jalanan, pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan memiliki potensi besar untuk memutus siklus kemiskinan dan keterpinggiran sosial.

Kendati demikian, efektivitas pelaksanaan program ini masih jarang dikaji secara akademik, terutama dalam aspek proses pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana program pelatihan keterampilan di UPTD Kampung Anak Negeri diimplementasikan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pemahaman proses pemberdayaan berdasarkan tahapan teoritis, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan teori pemberdayaan masyarakat serta menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga sosial, dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi intervensi sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi kelompok anak rentan.

B. LANDASAN TEORI

Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial merujuk pada pergeseran yang terjadi dalam struktur, pola, atau nilai kehidupan masyarakat akibat faktor internal maupun eksternal. Para ahli seperti Gillin, Selo Soemardjan, dan Weber menekankan bahwa perubahan ini bisa

terjadi karena perubahan geografis, budaya, struktur penduduk, hingga ketidakharmonisan dalam sistem sosial. Intinya, perubahan sosial mencerminkan dinamika masyarakat yang terus berkembang mengikuti waktu dan konteks sosialnya. Menurut John Luwis Gillin dan John Philip Gillin dilansir dari website (Quipper Indonesia, 2019), perubahan sosial merupakan suatu bentuk variasi dalam pola kehidupan yang telah mapan di masyarakat. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti pergeseran kondisi geografis, perkembangan kebudayaan material, perubahan dalam struktur penduduk, pergeseran ideologi, serta pengaruh dari penyebaran budaya (difusi) atau penemuan-penemuan baru yang muncul dalam lingkungan sosial.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses dan tujuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, kekuatan, dan kemandirian individu atau kelompok masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi rentan atau termarginalkan. Pemberdayaan melibatkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, akses terhadap sumber daya, dan kemampuan untuk mengambil keputusan. Konsep ini juga mencakup dimensi kekuasaan dan struktur sosial, di mana masyarakat diberi ruang dan peran untuk menentukan arah hidupnya sendiri secara berkelanjutan dan partisipatif. Dalam (Rianto, 2017) Pemberdayaan merupakan rangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi lemah, khususnya mereka yang terdampak oleh kemiskinan. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai suatu proses, tetapi juga sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai, yakni terciptanya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Hal ini mencakup kemampuan dalam aspek fisik, ekonomi, dan sosial, termasuk keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat serta kemandirian dalam menjalani berbagai tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Menurut Chambers mengutip dari sumber yang sama, Pemberdayaan merujuk pada peningkatan kapasitas individu, khususnya bagi kelompok yang rentan dan kurang berdaya, agar mereka memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui pemberdayaan, kelompok tersebut diharapkan memperoleh kebebasan dalam menentukan arah hidupnya. Kebebasan ini dapat muncul dari inisiatif kelompok itu sendiri maupun melalui dukungan dan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pariwisata Menurut Mardikanto (2013:109) dalam (Ginting et al., 2022), pemberdayaan memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1. Peningkatan kualitas kelembagaan (*better institution*), yaitu melalui pembenahan berbagai aktivitas dan kebijakan diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, termasuk dalam hal pengembangan jaringan kemitraan usaha.
2. Peningkatan usaha (*better business*), yang mencakup upaya peningkatan semangat belajar, perluasan akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan (*better income*), yang diharapkan terjadi seiring dengan membaiknya usaha masyarakat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penghasilan individu maupun keluarga.
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*), yaitu peningkatan pendapatan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan, baik secara fisik maupun sosial, mengingat kerusakan lingkungan sering kali berkaitan dengan kondisi kemiskinan.
5. Peningkatan kualitas hidup (*better living*), yang dapat tercapai melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan yang sehat.
6. Penguatan masyarakat (*better community*) sebagai wujud dari masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi.

Proses Pemberdayaan Masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto di dalam buku Syamsul Bahri (2019) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah *proses menjadi* (a process of becoming), bukan sesuatu yang berlangsung secara instan. Oleh karena itu, pemberdayaan dilakukan melalui tahapan-tahapan terstruktur dan berkelanjutan yang bertujuan mendorong masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar memiliki daya, kekuatan, dan kendali atas kehidupannya sendiri. Tiga tahapan utama dalam proses pemberdayaan tersebut meliputi:

Tahap Penyadaran (*Awareness Building*). Tahap ini merupakan fondasi awal dari pemberdayaan. Di sini, masyarakat diberi pencerahan mengenai hak-hak dasar mereka, potensi yang dimiliki, serta kesadaran bahwa mereka dapat mengubah kondisi hidupnya. Penyadaran dilakukan dengan cara memberikan informasi, pendidikan, atau pembelajaran yang membangun pemahaman dan keyakinan bahwa mereka layak dan mampu mencapai kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari tahap ini adalah menciptakan kesadaran dari dalam diri masyarakat, bukan semata-mata hasil intervensi luar.

Tahap Pengkapasitasan (*Capacity Building*). Setelah masyarakat menyadari potensi dan hak-haknya, mereka perlu dibekali kapasitas untuk bertindak. Tahap ini berfokus pada peningkatan kemampuan individu, kelompok, dan organisasi dalam mengelola kehidupan sosial-ekonomi mereka. Pengkapasitasan mencakup tiga aspek utama: peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan dan pendidikan; penguatan kapasitas kelembagaan seperti kelompok atau organisasi masyarakat; dan pengembangan sistem nilai seperti norma, aturan, budaya organisasi, serta etika yang mendukung keberdayaan. Tujuannya adalah menciptakan kesiapan struktural dan nilai yang memungkinkan masyarakat mengelola program dan pengambilan keputusan secara mandiri.

Tahap Pendayaan (*Empowerment Action*). Tahap ini merupakan bentuk akhir dari proses pemberdayaan, yaitu ketika masyarakat mulai diberi akses, kepercayaan, dan ruang untuk mengambil keputusan serta menjalankan peran aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Bentuknya bisa berupa pelibatan dalam program pembangunan, akses terhadap sumber daya ekonomi, atau penerapan keterampilan yang telah dimiliki. Pemberian daya dilakukan secara proporsional dengan kemampuan dan kesiapan masyarakat agar proses tersebut efektif dan

berkelanjutan. Pada tahap ini, masyarakat mulai diposisikan sebagai subjek, bukan lagi objek pembangunan. Pemberdayaan dipandang sebagai suatu proses bertahap yang terdiri dari tiga tahapan utama: Penyadaran, yaitu membangun kesadaran masyarakat atas hak, potensi, dan kemampuannya untuk berubah. Pengkapasitasan, yaitu membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap sumber daya. Pendayaan, yaitu memberikan ruang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Proses ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan dan menekankan pentingnya partisipasi, penghargaan terhadap martabat individu, serta keberlanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Penyadaran: Membangun Kesadaran Kritis atas Kondisi dan Potensi Diri

Pada tahap ini, UPTD Kampung Anak Negeri berfokus membangkitkan rasa percaya diri dan kesadaran akan potensi anak-anak binaan melalui pendekatan psikologis dan humanis, seperti konseling, diskusi, dan motivasi spiritual. Anak-anak yang sebelumnya merasa tidak berharga mulai menunjukkan kesadaran bahwa mereka memiliki kemampuan dan harapan untuk masa depan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses penyadaran berhasil membentuk motivasi intrinsik dan kesiapan mental, yang menjadi dasar penting untuk melanjutkan ke tahap pemberdayaan berikutnya. Temuan ini didukung oleh teori Wrihatnolo & Dwijowijoto (2007) dan penelitian Anwar (2022), yang menunjukkan bahwa pendidikan dan pendekatan empatik mampu memulihkan semangat dan kepercayaan diri anak-anak rentan.

2. Tahap Pengkapasitasan: Pemberian Keterampilan dan Akses Sumber Daya

Setelah kesadaran terbentuk, UPTD memberikan pelatihan keterampilan seperti seni, musik, olahraga, dan kewirausahaan, yang disertai penguatan soft skills seperti disiplin dan tanggung jawab. Kegiatan dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan langsung anak-anak dalam pelatihan dan kompetisi. Pendampingan intensif oleh para pembina turut memperkuat proses belajar dan perkembangan psikologis peserta. Tahap ini terbukti efektif dalam membekali anak-anak dengan kemampuan teknis dan mental, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Mubarog & Cintya Veredile, 2023) yang menekankan pentingnya fasilitas pelatihan dan peran aktif instruktur dalam meningkatkan kemandirian ekonomi anak-anak jalanan.

3. Tahap Pendayaan: Pemberian Ruang dan Kesempatan untuk Berperan Aktif

Tahap akhir ini menunjukkan bagaimana anak-anak mulai dilibatkan dalam kegiatan sosial dan produktif seperti pameran, perlombaan, diskusi masa depan, hingga perencanaan karier. Mereka diberi ruang untuk mengekspresikan minat dan mengambil peran sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan dirinya. Hal ini menunjukkan keberhasilan internal UPTD dalam membangun kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab anak-anak. Namun, keterbatasan terletak pada minimnya kerja sama eksternal dengan pihak swasta, LSM, atau lembaga pendidikan nonformal,

yang berdampak pada terbatasnya akses anak-anak terhadap kesempatan pasca-pembinaan. Temuan ini menjadi pembeda dari penelitian Rahmadeva yang menyoroiti lemahnya partisipasi dan keberlanjutan program pemberdayaan di lokasi lain. Dengan demikian, meskipun pendayaan di UPTD telah menunjukkan efektivitas secara psikososial, dibutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan melalui kolaborasi lintas sektor agar pemberdayaan dapat berlanjut secara konkret dalam kehidupan anak-anak setelah keluar dari lembaga.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya telah terlaksana secara bertahap dan menyeluruh sesuai dengan teori Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, yaitu melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tahap penyadaran berhasil membangun kesadaran diri anak-anak melalui pendekatan emosional dan spiritual. Tahap pengkapasitasan memberikan pelatihan keterampilan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk karakter dan kepercayaan diri. Sementara itu, tahap pendayaan memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyalurkan bakat, merancang masa depan, dan mengambil peran aktif dalam kehidupannya.

Program ini tidak hanya menyentuh aspek keterampilan, tetapi juga berhasil membangun dimensi psikososial seperti harga diri dan motivasi anak. Terlihat adanya perubahan positif dalam sikap, partisipasi, dan semangat hidup anak-anak binaan. Oleh karena itu, UPTD Kampung Anak Negeri terbukti berperan penting sebagai lembaga yang tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga membangun harapan dan arah hidup yang lebih baik bagi anak-anak dalam kondisi rentan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini menyarankan agar UPTD Kampung Anak Negeri segera menjalin kerja sama strategis dengan pihak eksternal, seperti LSM, dunia usaha, dan lembaga pelatihan nonformal. Ketidadaan kolaborasi lintas sektor saat ini menjadi hambatan utama dalam memperluas dampak pemberdayaan, khususnya pada tahap pendayaan. Tanpa dukungan eksternal, hasil pembinaan berisiko tidak berlanjut setelah anak-anak kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti pengadaan pelatihan lanjutan, penyaluran minat dan bakat, serta kemitraan dengan sektor lokal untuk memastikan keberlanjutan dan kemandirian anak-anak binaan secara ekonomi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2022). PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN. *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 402–442. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i2.2255>
- Dinas Sosial Kota Surabaya. (2024). *Jumlah Anak terlantar di luar panti sosial berdasarkan jenis kelamin menurut Kecamatan*. <https://opendata.surabaya.go.id/dataset/jumlah-anak-terlantar-berdasarkan-jenis-kelamin-dan-kecamatan>

- Ginting, S., Sembiring, R., Arlina, Dewi, E., & Kristian P.M., R. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA KOLAM SODA DESA BULUH NAMAN KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 02(05).
- Mubarog, H., & Cintya Veredile, D. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN PADA DINAS SOSIAL KOTA PROBOLINGGO (Studi Kasus Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Kota Probolinggo). *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 10(1).
- Quipper Indonesia. (2019, August 12). *Perubahan Sosial Menurut Para Ahli – Sosiologi Kelas 12*.
https://www.quipper.com/id/blog/mapel/sosiologi/perubahan-sosial-menurut-para-ahli/#1_Menurut_John_Luwis_Gillin_dan_John_Philip_Gillin
- Rahmawati, E. D., & Roisul Basyar, M. (2023). PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.
- Rianto, D. M. (2017). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN SENTRA KRIYA OLEH RUMAH PINTAR ATSIRI KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR.
- Syamsul Bahri, E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*.
https://books.google.co.id/books/about/Manajemen_Pemberdayaan.html?id=PApyb4Uje2IC&redir_esc=y